

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa realisasi anggaran dan neraca disertai catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan kewajiban setiap SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah selaku entitas akuntansi sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran.

Laporan keuangan ini merupakan bahan masukan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang serta sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Maret 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. H. Muslimin, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA Permendagri 13 dan LRA Permendagri 64);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2018.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singkawang, Maret 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. H. Muslimin, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar isi

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. LRA 64

2. LRA 13

B. Laporan Operasional (LO)

C. Neraca

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

I. Pendahuluan

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan pencapaian Target Kinerja

A. Ekonomi Makro

B. Kebijakan Keuangan

C. Indikator Pencapaian Target APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

1. Penjelasan Pos-pos Neraca

1.1 Aset Lancar

1.2 Aset tetap

1.3 Aset Lainnya

1.4 Kewajiban

1.5 Ekuitas

2. Penjelasan LRA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.2 Belanja

3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan pada Badan Keuangan Daerah

A. Gambaran Umum BKD Kota Singkawang

B. Visi dan Misi BKD Kota Singkawang

VII. Penutup

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang selama satu periode pelaporan terutama untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan setiap kegiatan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode.

2. Manajemen

Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan badan keuangan Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah menyajikan informasi bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas serta dapat dijadikan tolok ukur dan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 17).
13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 66).

14. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintah Kota Singkawang.
15. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Singkawang.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan terbagi atas 7 (tujuh) bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja

- A. Ekonomi Makro.
- B. Kebijakan Keuangan.
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan.
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan.
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan.
 1. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

- a. Aset
 - b. Kewajiban
 2. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan
 - b. Beban
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
- B. Laporan Keuangan Pengeluaran PPKD
1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Hibah
 - b. Belanja Bantuan Sosial
 - c. Belanja Bantuan Keuangan
 - d. Belanja Tidak Terduga
 2. Pembiayaan
 - a. Pengeluaran Pembiayaan
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
 - B. Visi dan Misi

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan kebijakan fiskal dalam kerangka penyediaan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pembantu Walikota bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat kebijakan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel tersebut, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna agar

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Target kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dicapai melalui indikator program/kegiatan sebagai berikut:

- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- Terlaksananya peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah agar dapat berjalan selaras antara potensi daerah dan kebutuhan daerah;
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan keuangan daerah;
- Terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas serta meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan barang untuk daerah.

Indikator pencapaian target kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagaimana di atas dapat terlaksana karena sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan didukung oleh pembiayaan yang memadai.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi pendapatan asli daerah dalam Tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 43.670.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.233.640.629,57 atau 110,45 persen berbanding realisasi Tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 36.920.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.486.320.811,44 atau 106,95 persen. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat pengeluaran dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 21.986.838.622,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.605.126.069,00 atau 80,07 persen.

Gambaran realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 48.215.803.129,57 atau 110,66 persen dari target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp. 43.570.000.000,00 dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dari Penggunaan Fasilitas Aset/Kekayaan Daerah sebesar Rp. 17.837.500,00 atau 17,84 persen dari target retribusi APBD Tahun 2018 setelah perubahan sebesar 100.000.000,00.

Apabila diuraikan dari realisasi masing-masing kelompok dan jenis Pendapatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Target Pendapatan 2018	Realisasi 2018	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	43.570.000.000,00	48.215.803.129,57	110,66
	2. Retribusi Daerah	100.000.000,00	17.837.500,00	17,84
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	-
2.	Dana Perimbangan	-	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-
Jumlah		43.670.000.000,00	48.233.640.629,57	110,45

2. Belanja

Realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.605.126.069,00 atau 80,07 persen dari anggaran belanja dalam APBD Tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp. 21.986.838.622,00

Apabila diuraikan dari realisasi masing-masing kelompok dan jenis jenis belanja adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2018	Realisasi 2018	%
1.	Belanja Operasi	17.435.951.622,00	14.113.944.961,00	80,95
	1. Belanja pegawai	8.704.968.460,00	7.722.021.077,00	88,71
	2. Belanja barang dan Jasa	8.648.483.162,00	6.322.869.884,00	73,11
2.	Belanja Modal	4.550.887.000,00	3.491.181.108,00	76,71
	1. Belanja Tanah	557.627.000,00	0,00	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	3.322.310.000,00	2.944.488.074,00	88,63
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	400.700.000,00	399.469.424,00	99,69
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	270.250.000,00	147.223.610,00	54,48
	5. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	-
	Jumlah	21.986.838.622,00	17.605.126.069,00	80,07

3. Surplus/Defisit

Realisasi surplus (defisit) APBD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 mencapai **Surplus** sebesar Rp. 30.628.514.560,57 berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 48.233.640.629,57 dikurangi dengan realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 17.605.126.069,00.

Apabila diuraikan dari realisasi Pendapatan dan Belanja adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2018	%	Pencapaian
1.	Pendapatan Asli Daerah	48.233.640.629,57	110,45	-
2.	Belanja	17.605.126.069,00	80,07	-
	Jumlah	30.628.514.560,57	141,25	Surplus

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan:

- a. Peningkatan kualitas layanan pajak (sarana dan prasarana) masih perlu ditingkatkan, terutama program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan dan fasilitas pelayanan umum wajib pajak, penyimpanan dokumen administrasi keuangan dan gudang barang.
- b. Kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik sisi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan dalam peningkatan pendapatan pajak daerah Kota Singkawang.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak.
- d. Terlambatnya dalam penetapan Perda perubahan APBD Kota Singkawang.
- e. Penyampaian RKA dan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu.
- f. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan aset.
- g. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang mempunyai fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan entitas akuntansi dan pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan bertugas untuk menyusun pertanggungjawaban dan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a) Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- e) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sedangkan basis aktual untuk pengakuan aset yang penerapannya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau pada saat cek dikeluarkan oleh bendahara umum daerah;

- b. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atas penggunaan uang persediaan, belanja diakui pada saat pengesahan SPJ oleh fungsi perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
- c. Aset diakui pada saat diterima atau pemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Selama tahun berjalan aset diakui sebesar nilai pembayaran/perolehan;
- d. Ekuitas dicatat berdasarkan nilai nominal pada saat terjadinya transaksi.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas yang menjadi hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

d. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kota Singkawang. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik data tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Kota Singkawang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebagai biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

- a) Tanah dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah atau dikuasai oleh pemerintah.
- b) Luas tanah dicatat berdasarkan data administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah Kota Singkawang.
- c) Penilaian harga tanah berdasarkan administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah Kota Singkawang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh tim penilai tanah.
- d) Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru, jika bangunan tua itu masih dimaksudkan untuk dibongkar.

Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal Tanah:

- a) Belanja modal pembebasan tanah
 - b) Belanja modal belanja ATK
 - c) Belanja modal belanja penggandaan
 - d) Belanja modal belanja makanan dan minuman rapat
 - e) Belanja modal belanja jasa tim penilai tanah
- 4) Peralatan dan Mesin
- a) Mencakup antara lain: alat angkutan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubel air, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat ukur, alat-alat laboratorium yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

- b) Jumlah unit dan harga peralatan dan mesin dicatat berdasarkan data administrasi yang tercatat di setiap Unit Kerja di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berdasarkan tahun perolehannya, dan pedoman harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan kota Singkawang tahun yang bersangkutan, dan berdasarkan Harga Wajar Pasar.
- c) Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset agar dapat digunakan. Peralatan dan mesin yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- d) Untuk Penilaian harga alat angkutan berdasarkan Catatan Administrasi pada Unit Kerja dan berdasarkan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun yang bersangkutan yang dikeluarkan kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap).
- e) Kendaraan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga atau harga gantinya.

Komponen biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

- a) Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin
- b) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin.
- c) Belanja modal sewa peralatan, peralatan dan mesin.
- d) Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin.
- e) Belanja modal perizinan peralatan dan mesin.
- f) Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin.
- g) Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin.

5) Gedung dan Bangunan

- a) Data yang diperoleh mengenai luas dicatat berdasarkan data administrasi pada setiap Satuan Kerja di Pemerintah Kota Singkawang.
- b) Penilaian harga bangunan gedung berdasarkan data Administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah Kota Singkawang dan/atau nilai taksiran dengan berdasarkan harga standar bangunan baru per meter persegi dan faktor permanenisasi bangunan gedung yang disesuaikan dengan koefisien bangunan bertingkat berdasarkan ketentuan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- c) Nilai yang ditetapkan harus menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya dari bagian pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

- a) Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan
 - b) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis gedung dan bangunan.
 - c) Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan
 - d) Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan
 - e) Belanja modal perizinan gedung dan bangunan
 - f) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan
 - g) Belanja modal perjalanan gedung dan bangunan.
- 6) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- a) Meliputi jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota serta Instalasi Listrik dan Telepon.
 - b) Jumlah dicatat berdasarkan Catatan Administrasi pada Dinas sesuai tahun perolehannya.

- c) Penilaian harga jalan berdasarkan pada harga standar pembuatan per buah konstruksinya, data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Singkawang.
- d) Nilai tersebut menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi maupun jaringan sampai dengan aset tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan, dan biaya administrasi) sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.

Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- a) Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan.
 - b) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan.
 - c) Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan.
 - d) Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
 - e) Belanja modal perizinan jalan dan jembatan.
 - f) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan.
 - g) Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan.
 - h) Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan.
 - i) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan.
 - j) Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan.
 - k) Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan.
 - l) Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan.
 - m) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan.
 - n) Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.
- 7) Aset Tetap Lainnya
- a) Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas.
 - b) Meliputi Koleksi Perpustakaan atau Buku dan Barang Bercorak Seni/Budaya/Olahraga.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- b) Dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
- c) Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

g. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

h. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Peraturan Walikota tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Singkawang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehan, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil investarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018.

c. Penyusutan

Pemerintah Kota Singkawang telah menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

I. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. ASET

Saldo Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

ASET	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Aset Lancar	18.055.946.096,27	11.734.578.157,64
2. Aset Tetap	42.640.559.946,55	44.164.761.064,90
3. Aset Lainnya	387.591.000,00	85.750.000,00
<i>Jumlah Aset</i>	<i>61.084.097.042,82</i>	<i>55.985.089.222,54</i>

1.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau memiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian dan Perbandingan Saldo Aset Lancar 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Piutang Pendapatan	29.997.360.608,80	22.329.367.934,80
2. Penyisihan Piutang Pendapatan	(12.050.107.787,53)	(10.724.553.127,16)
3. Persediaan	108.693.275,00	129.763.350,00
<i>Jumlah Aset Lancar</i>	<i>18.055.946.096,27</i>	<i>11.734.578.157,64</i>

1.1.1. Piutang Pendapatan/Pajak Daerah

Piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan daerah.

Nilai piutang pendapatan dalam hal ini piutang pajak daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 29.997.360.608,80 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.667.992.674,00 dari posisi per 31 Desember 2017

sebagai akibat pelunasan, timbulnya piutang yang baru pada Tahun 2018, piutang macet lebih dari 5 tahun dan denda piutang pajak (denda piutang PBB-P2). Nilai piutang pendapatan/pajak daerah tersebut terdiri dari:

Piutang Pendapatan/Pajak Daerah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Piutang Pajak Hotel	667.343.710,80	929.562.967,80
2. Piutang Pajak Restoran	981.275.177,00	974.431.474,00
3. Piutang Pajak Hiburan	413.672.328,00	721.961.757,00
4. Piutang Pajak Reklame	67.962.828,00	17.470.965,00
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	1.135.186.911,00
6. Piutang Pajak Parkir	33.807.200,00	0,00
7. Piutang Pajak Air Tanah	9.962.760,00	7.852.560,00
8. Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	686.858,00	321.894,00
10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	27.722.259.799,00	18.441.750.338,00
11. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	100.389.948,00	100.829.068,00
Jumlah Piutang Pendapatan / Pajak Daerah	29.997.360.608,80	22.329.367.934,80

Rincian daftar Piutang Pajak Daerah terlampir

1.1.2. Penyisihan Piutang Pendapatan

Pada Tahun 2018 dilakukan penyisihan piutang pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai upaya untuk menyajikan nilai piutang pendapatan yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp. 10.724.553.127,16 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12.050.107.787,53 pencatatan penyisihan piutang pendapatan ini dihitung dari nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan penggolongan kualitas piutang pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Penyisihan Piutang Pajak Hotel		
a. Kualitas Piutang Lancar	0,00	4.053.075,22
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	54.839.578,60	0,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	118.947.924,80	118.947.924,80
Jumlah	173.787.503,40	123.001.000,02

2. Penyisihan Piutang Pajak Restoran		
a. Kualitas Piutang Lancar	1.669.408,36	2.892.730,37
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	25.150.810,60	0,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	395.885.400,00	395.885.400,00
<i>Jumlah</i>	<i>422.705.618,96</i>	<i>398.778.130,37</i>
3. Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		
a. Kualitas Piutang Lancar	22.320,00	3.597.358,79
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	40.671.832,80	0,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	2.490.000,00	2.490.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>43.184.152,80</i>	<i>6.087.358,79</i>
4. Penyisihan Piutang Pajak Reklame		
a. Kualitas Piutang Lancar	308.322,27	30.453,58
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	366.812,50	1.121.450,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	1.315.125,00	82.875,00
d. Kualitas Piutang Macet	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>1.990.259,77</i>	<i>1.234.778,58</i>
5. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		
a. Kualitas Piutang Lancar	0,00	0,00
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	0,00	0,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Penyisihan Piutang Pajak Parkir		
a. Kualitas Piutang Lancar	169.036,00	0,00
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	0,00	0,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>169.036,00</i>	<i>0,00</i>
7. Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		
a. Kualitas Piutang Lancar	14.837,40	12.228,00
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	213.072,00	123.240,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	1.959.960,00	2.087.280,00
d. Kualitas Piutang Macet	944.640,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>3.132.509,40</i>	<i>2.222.748,00</i>

8. Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
a. Kualitas Piutang Lancar	0,00	0,00
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	0,00	0,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
a. Kualitas Piutang Lancar	1.824,82	0,00
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	0,00	32.189,40
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	160.947,00	0,00
d. Kualitas Piutang Macet	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>162.771,82</i>	<i>32.189,40</i>
10. Penyisihan Piutang PBB P2		
a. Kualitas Piutang Lancar	22.048.639,48	23.868.552,99
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	364.986.977,40	168.825.638,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	2.124.403.861,50	2.080.109.698,00
d. Kualitas Piutang Macet	8.793.146.509,00	7.819.563.965,00
<i>Jumlah</i>	<i>11.304.585.987,38</i>	<i>10.092.367.853,99</i>
11. Penyisihan Piutang BPHTB		
e. Kualitas Piutang Lancar	0,00	0,00
f. Kualitas Piutang Kurang Lancar	0,00	0,00
g. Kualitas Piutang Ragu-ragu	0,00	0,00
h. Kualitas Piutang Macet	100.389.948,00	100.829.068,00
<i>Jumlah</i>	<i>100.389.948,00</i>	<i>100.829.068,00</i>
<i>Jumlah Penyisihan Piutang</i>	<i>12.050.107.787,53</i>	<i>10.724.553.127,16</i>

Rincian daftar Penyisihan Piutang Pajak terlampir

1.1.3. Persediaan

Pos persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Saldo Persediaan ini merupakan hasil *opname* yang dilakukan. Rincian persediaan Badan Keuangan Daerah Sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.451.075,00	3.290.100,00
2. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	354.000,00	91.500,00
3. Persediaan Barang Cetak	105.888.200,00	90.439.750,00
Jumlah Persediaan	108.693.275,00	129.763.350,00

Rincian daftar persediaan Tahun 2018 terlampir

1.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Tanah	28.724.118.931,97	28.724.118.931,97
2. Peralatan dan Mesin	12.894.427.227,00	14.370.659.814,00
3. Gedung dan Bangunan	11.577.597.522,54	9.335.037.014,00
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	749.335.605,00	749.335.605,00
5. Aset Tetap Lainnya	5.460.000,00	5.460.000,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	91.498.000,00	91.498.000,00
7. Akumulasi Penyusutan	(11.401.877.339,96)	(9.111.348.300,07)
Jumlah	42.640.559.946,55	44.164.761.064,90

1.2.1. Tanah

Tanah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Tanah Untuk Bangunan Gedung	27.628.065.931,97	27.628.065.931,97
2. Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.096.053.000,00	1.096.053.000,00
Jumlah	28.724.118.931,97	28.724.118.931,97

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 merupakan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017.

1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Alat Angkutan Darat Bermotor	5.012.264.286,00	7.886.304.286,00
2. Alat Ukur	7.200.000,00	7.200.000,00
3. Alat Kantor	1.046.803.026,00	738.603.207,00
4. Alat Rumah Tangga	1.161.876.897,00	984.619.625,00
5. Komputer	4.847.177.411,00	3.951.639.696,00
6. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	154.778.875,00	149.983.000,00
7. Alat Studio	422.966.732,00	395.350.000,00
8. Alat Komunikasi	16.385.000,00	31.985.000,00
9. Peralatan Pemancar	2.725.000,00	2.725.000,00
10. Unit-Unit Laboratorium	24.500.000,00	24.500.000,00
11. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	197.750.000,00	197.750.000,00
Jumlah	12.894.427.227,00	14.370.659.814,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 merupakan saldo per 31 Desember 2017 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/kurang karena adanya belanja modal Tahun 2018, mutasi masuk, kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, barang bersumber dari perolehan lainnya, mutasi keluar, penghapusan, hibah keluar, reklasifikasi tahun berjalan, sehingga nilai saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.12.894.427.227,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 31 Desember 2018	14.370.659.814,00
2. Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal 2018	2.944.488.074,00
- Kapitalisasi realisasi Belanja Non Modal	7.000.000,00
3. Pengurangan:	
- Mutasi Keluar	(4.022.943.661,00)
- Hibah Keluar	(323.025.000,00)
- Reklasifikasi Tahun Berjalan	(81.752.000,00)
4. Saldo Akhir per 31 Desember 2018	12.894.427.227,00

Saldo Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan

a. *Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2018 Sebesar Rp. 2.944.488.074,00 Terdiri dari alat-alat angkutan sebesar Rp. 612.800.000,00. Alat kantor dan rumah tangga Rp. 2.268.544.892,00. Alat studio dan alat komunikasi Rp. 63.143.182,00. Dengan rincian sebagai berikut:

<i>Belanja Modal Alat Alat Angkutan</i>	<i>Spek Barang</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Kendaraan Roda 4</i>	<i>Innova 2.0 V M/T</i>	<i>1</i>	<i>353.150.000,00</i>	<i>353.150.000,00</i>
<i>Sepeda Motor</i>	<i>Vega</i>	<i>9</i>	<i>16.430.000,00</i>	<i>147.870.000,00</i>
<i>Sepeda Motor</i>	<i>Jupiter</i>	<i>6</i>	<i>18.630.000,00</i>	<i>111.780.000,00</i>
<i>Jumlah</i>				<i>612.800.000,00</i>

<i>Belanja Modal Alat Alat Angkutan</i>	<i>Spek Barang</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>AC Split</i>	<i>Sharp AH-A12SAY</i>	<i>6</i>	<i>6.806.000,00</i>	<i>40.836.000,00</i>
<i>AC Split</i>	<i>Sharp AH-A9UCY</i>	<i>10</i>	<i>4.664.392,00</i>	<i>46.643.920,00</i>
<i>Kipas Angin</i>	<i>Regency Tornado</i>	<i>29</i>	<i>865.169,00</i>	<i>25.089.901,00</i>
<i>Kipas Angin</i>	<i>Regency Tornado</i>	<i>1</i>	<i>865.179,00</i>	<i>865.179,00</i>
<i>Televisi</i>	<i>Sharp</i>	<i>13</i>	<i>3.213.986,00</i>	<i>41.781.818,00</i>
<i>Router</i>		<i>2</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>
<i>Router</i>		<i>1</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.150.000,00</i>
<i>Router</i>		<i>1</i>	<i>2.450.000,00</i>	<i>2.450.000,00</i>
<i>PC</i>	<i>HP All In One</i>	<i>30</i>	<i>6.030.938,00</i>	<i>180.928.140,00</i>
<i>PC</i>	<i>HP All In One</i>	<i>2</i>	<i>6.030.930,00</i>	<i>12.061.860,00</i>
<i>Printer</i>	<i>Epson L 565</i>	<i>10</i>	<i>4.784.017,00</i>	<i>47.840.170,00</i>
<i>Printer</i>	<i>Epson L 360</i>	<i>48</i>	<i>2.757.197,00</i>	<i>132.345.456,00</i>
<i>Printer</i>	<i>Epson L 360</i>	<i>2</i>	<i>2.757.187,00</i>	<i>5.514.374,00</i>
<i>Router</i>		<i>1</i>	<i>16.550.000,00</i>	<i>16.550.000,00</i>
<i>Harddisk</i>		<i>4</i>	<i>1.540.000,00</i>	<i>6.160.000,00</i>
<i>Harddisk</i>		<i>2</i>	<i>1.540.000,00</i>	<i>3.080.000,00</i>
<i>Kursi Kerja Staf</i>		<i>80</i>	<i>685.125,00</i>	<i>54.810.000,00</i>

<i>AC Split</i>	<i>Sharp AH-A12SAY</i>	6	6.810.000,00	40.860.000,00
<i>Air Purifier</i>		6	6.025.000,00	36.150.000,00
<i>Printer</i>	<i>HP Laser Jett</i>	2	15.765.000,00	31.530.000,00
<i>Lemari Besi/Metal</i>	<i>Rione</i>	10	2.771.791,00	27.717.910,00
<i>Lemari Besi/Metal</i>	<i>Rione</i>	1	2.771.789,00	2.771.789,00
<i>Filling Besi</i>	<i>Rione</i>	10	2.570.936,00	25.709.360,00
<i>Filling Besi</i>	<i>Rione</i>	1	2.570.941,00	2.570.941,00
<i>Meja Rapat</i>	<i>UNO Persegi</i>	5	2.230.000,00	11.150.000,00
<i>Meja 1 Biro</i>		30	2.175.560,00	65.266.800,00
<i>Meja 1/2 Biro</i>		50	1.433.664,00	71.683.200,00
<i>Kursi Tamu</i>		8	5.118.750,00	40.950.000,00
<i>Printer</i>	<i>Khusus ID Card</i>	1	30.660.000,00	30.660.000,00
<i>Mesin Perforasi</i>		1	93.720.000,00	93.720.000,00
<i>Mesin Perforasi</i>		1	53.880.000,00	53.880.000,00
<i>Brankas BPKB</i>		1	77.450.000,00	77.450.000,00
<i>Server</i>		1	75.150.000,00	75.150.000,00
<i>Printer</i>	<i>Kyocera Ecosys</i>	1	11.250.000,00	11.250.000,00
<i>Gorden</i>		1	95.243.074,00	95.243.074,00
<i>Tapping Box</i>		30	14.946.250,00	448.387.500,00
<i>OCR</i>		10	14.946.250,00	149.462.500,00
<i>Teralis</i>		1	38.915.000,00	38.915.000,00
<i>Teralis</i>		1	27.785.000,00	27.785.000,00
<i>Teralis (Pintu 1 Daun)</i>		2	1.505.000,00	3.010.000,00
<i>Teralis (Pintu 2 Daun)</i>		8	1.905.000,00	15.240.000,00
<i>Kursi Rapat</i>	<i>Futura</i>	354	465.986,00	164.959.044,00
<i>Kursi Rapat</i>	<i>Futura</i>	1	465.956,00	465.956,00
Jumlah				2.268.544.892,00

<i>Belanja Modal Alat Studio Dan Alat Komunikasi</i>	<i>Spek Barang</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Parabola</i>		12	1.205.245,00	14.462.940,00
<i>Parabola</i>		1	1.205.242,00	1.205.242,00
<i>Proyektor</i>	<i>Epson</i>	2	6.105.000,00	12.210.000,00
<i>UPS</i>	<i>ICA</i>	28	1.045.172,00	29.264.816,00
<i>UPS</i>	<i>ICA</i>	1	1.045.184,00	1.045.184,00
<i>Layar Proyektor</i>		1	4.955.000,00	4.955.000,00
Jumlah				63.143.182,00

b. *Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa*

Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa peralatan dan mesin Tahun 2018 yaitu Aksesoris Kendaraan sebesar Rp. 7.000.000,00

Kapitalisasi Aksesoris Kendaraan	Jlh	Harga Satuan	Harga
Aksesoris Kendaraan Walikota	1	7.000.000,00	7.000.000,00
Jumlah			7.000.000,00

2. **Pengurangan**

a. *Mutasi Keluar*

Mutasi keluar peralatan dan mesin pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.022.943.661,00 terdiri dari alat-alat angkutan sebesar Rp. 3.177.840.000,00, alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 793.977.211,00 serta alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp. 51.126.450,00.

Alat Alat Angkutan	Jlh	Harga	Jumlah	Tujuan SKPD
Kendaraan Dinas Operasional Walikota Singkawang	1	1.499.300.000,00	1.499.300.000,00	Setda
Aksesoris Kendaraan Dinas Operasional Walikota Singkawang (Barang Jasa)	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Setda
Kendaraan Dinas Operasional Wakil Walikota Singkawang	1	1.499.300.000,00	1.499.300.000,00	Setda
Sepeda Motor Kawasaki D Tracker	1	34.200.000,00	34.200.000,00	Setda
Sepeda Motor Jupiter	2	18.630.000,00	37.260.000,00	Setda
Sepeda Motor Yamaha Vega	1	16.430.000,00	16.430.000,00	Kesbang
Sepeda Motor Yamaha Vega	1	16.430.000,00	16.430.000,00	Penanaman Modal
Sepeda Motor Jupiter	1	18.630.000,00	18.630.000,00	Bappeda
Sepeda Motor Yamaha Vega	1	16.430.000,00	16.430.000,00	Disperindag
Sepeda Motor Yamaha Vega	2	16.430.000,00	32.860.000,00	Pendidikan
Jumlah			3.177.840.000,00	

<i>Alat Kantor dan Rumah Tangga:</i>	<i>Merk</i>	<i>Tahun</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Harga</i>	<i>Tujuan SKPD</i>
Mesin Ketik Manual Standar		2016	2	2.135.000,00	4.270.000,00	Diskominfo
Lemari Besi/Metal	Rione	2018	1	2.771.791,00	2.771.791,00	Setda
Filling Besi/Metal	Rione	2018	1	2.570.936,00	2.570.936,00	Setda
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	2	685.125,00	1.370.250,00	Setda
Kursi Tamu		2018	1	5.118.750,00	5.118.750,00	Setda
Meja Rapat	Uno Persegi	2018	1	2.230.000,00	2.230.000,00	Setda
Meja 1/2 Biro		2018	2	1.433.664,00	2.867.328,00	Setda
AC Split	1,5 PK	2018	1	6.806.000,00	6.806.000,00	Setda
Televisi		2018	1	3.213.986,00	3.213.986,00	Setda
PC	HP All in One	2018	3	6.030.938,00	18.092.814,00	Setda
Air Purifier		2018	6	6.025.000,00	36.150.000,00	Setda
Printer	Epson L360	2018	3	2.757.197,00	8.271.591,00	Setda
Lemari Besi/Metal	Rione	2018	1	2.771.791,00	2.771.791,00	Kesbang
Filling Besi/Metal	Rione	2018	1	2.570.936,00	2.570.936,00	Kesbang
PC	HP All in One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	Kesbang
Printer	Epson L360	2018	1	2.757.197,00	2.757.197,00	Kesbang
Kursi Tamu		2018	1	5.118.750,00	5.118.750,00	Penanaman Modal
Meja Rapat	Uno Persegi	2018	2	2.230.000,00	4.460.000,00	Penanaman Modal
kipas angin		2018	2	865.169,00	1.730.338,00	Penanaman Modal
PC	HP All in One	2018	3	6.030.938,00	18.092.814,00	Penanaman Modal
Printer	Epson L360	2018	3	2.757.197,00	8.271.591,00	Penanaman Modal
PC	HP All in One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	Disperindag
Printer	Epson L360	2018	1	2.757.197,00	2.757.197,00	Disperindag
PC	HP All in One	2018	2	6.030.938,00	12.061.876,00	Satpol PP
Printer	Epson L360	2018	2	2.757.197,00	5.514.394,00	Satpol PP
Lemari Besi/Metal	Rione	2018	1	2.771.791,00	2.771.791,00	Kec. Skw Tengah
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	15	685.125,00	10.276.875,00	Kec. SKw Tengah, Kel. Condong, Sekip Lama, Roban, Jawa, Bukit Batu, Sei Wie
Meja 1 Biro		2018	7	2.175.560,00	15.228.920,00	Kec. SKw Tengah, Kel. Condong, Sekip Lama, Roban, Jawa, Bukit Batu, Sei Wie
Meja 1/2 Biro		2018	8	1.433.664,00	11.469.312,00	Kec. Skw Tengah, Kel. Condong, Sekip Lama, Roban, Jawa, Bukit Batu, Sei Wie
AC Split	1,5 PK	2018	1	6.806.000,00	6.806.000,00	Kec. Skw Tengah
kipas angin		2018	1	865.179,00	865.179,00	Kec. Skw Tengah
kipas angin		2018	5	865.169,00	4.325.845,00	Kel. Condong, Sekip Lama, Jawa, Bukit Batu, Sei Wie

Televisi		2018	2	3.213.986,00	6.427.972,00	Kec. Skw Tengah, Bukit Batu
Printer	Epson L360	2018	8	2.757.197,00	22.057.576,00	Kec. SKw Tengah, Kel. Condong, Sekip Lama, Roban, Jawa, Bukit Batu, Sei Wie
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	17	685.125,00	11.647.125,00	Kec. Skw Utara, Sei Bulan, Sungai rasau, Setapak Besar, Setapak Kecil, Naram, Sungai Garam Hilir, Semelagi Kecil
Meja 1 Biro		2018	8	2.175.560,00	17.404.480,00	Kec. Skw Utara, Sei Bulan, Sungai rasau, Setapak Besar, Setapak Kecil, Naram, Sungai Garam Hilir, Semelagi Kecil
Meja 1/2 Biro		2018	9	1.433.664,00	12.902.976,00	Kec. Skw Utara(2), Sei Bulan, Sungai rasau, Setapak Besar, Setapak Kecil, Naram, Sungai Garam Hilir, Semelagi Kecil
Meja Rapat	Uno Persegi	2018	1	2.230.000,00	2.230.000,00	Semelagi Kecil
kipas angin		2018	8	865.169,00	6.921.352,00	Kec. Skw Utara, Sei Bulan, Sungai rasau, Setapak Besar, Setapak Kecil, Naram, Sungai Garam Hilir, Semelagi Kecil
Televisi		2018	1	3.213.986,00	3.213.986,00	Setapak Kecil
PC	HP All In One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	Setapak Kecil
Printer	Epson L360	2018	1	2.757.197,00	2.757.197,00	Setapak Kecil
Printer	Epson L360	2018	6	2.757.197,00	16.543.182,00	Kel Sei Bulan, Sungai rasau, Setapak Besar, Naram, Sungai Garam Hilir, Semelagi Kecil
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	13	685.125,00	8.906.625,00	Kec. Swk Timur, Kel. Nyarumkop, Mayasopa, Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan
Meja 1 Biro		2018	6	2.175.560,00	13.053.360,00	Kec. Swk Timur, Kel. Nyarumkop, Mayasopa, Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan

Meja 1/2 Biro		2018	7	1.433.664,00	10.035.648,00	Kec. Swk Timur (2), Kel. Nyarumkop, Mayasopa, Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan
kipas angin		2018	4	865.169,00	3.460.676,00	Kec. Swk Timur, Kel. Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan
Televisi		2018	5	3.213.986,00	16.069.930,00	Kel. Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan (Skw Timur)
Printer	Epson L360	2018	5	2.757.197,00	13.785.985,00	Kel. Nyarumkop, Mayasopa, Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan
AC Split	1,5 PK	2018	1	6.806.000,00	6.806.000,00	Kec. Skw Selatan
AC Split	1 PK	2018	3	4.664.392,00	13.993.176,00	Sedau, Pangmilang, Sagatani (Kec. Skw Selatan)
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	11	685.125,00	7.536.375,00	Kec. Skw Selatan(3), Sedau (2), Sijangkung (2), Pangmilang (2), Sagatani (2)
Meja 1 biro		2018	4	2.175.560,00	8.702.240,00	Kec. Skw Selatan, Kel. Sedau, Sijangkung, Pangmilang,
Meja 1 biro		2017	1	2.175.000,00	2.175.000,00	Kel. Sagatani (Kec. Skw Selatan)
Meja 1/2 Biro		2018	6	1.433.664,00	8.601.984,00	Kec. Skw Selatan (2), Kel. Sedau, Sijangkung, Pangmilang, Sagatani
Kipas angin		2018	5	865.169,00	4.325.845,00	Kec. Skw Selatan, Kel. Sedau, Sijangkung, Pangmilang, Sagatani
Televisi		2018	2	3.213.986,00	6.427.972,00	Kel. Sedau, Pangmilang
Kursi Tamu		2018	1	5.118.750,00	5.118.750,00	Kel. Sedau
Printer	Epson L360	2018	4	2.757.197,00	11.028.788,00	Kel. Sedau, Sijangkung, Pangmilang, Sagatani
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	11	685.125,00	7.536.375,00	Kec. Skw Barat, Ke. Pasiran, Kuala, Melayu, Tengah

Meja 1 Biro		2018	5	2.175.560,00	10.877.800,00	Kec. Skw Barat, Ke. Pasiran, Kuala, Melayu, Tengah
Meja 1/2 Biro		2018	6	1.433.664,00	8.601.984,00	Kec. Skw Barat, Ke. Pasiran, Kuala, Melayu, Tengah
Kursi Tamu	1 PK	2018	2	5.118.750,00	10.237.500,00	Kel. Pasiran, Kel. Melayu
AC Split		2018	1	4.664.392,00	4.664.392,00	Kel. Tengah (Kec. Skw Barat)
kipas angin		2018	5	865.169,00	4.325.845,00	Kec. Skw Barat, Ke. Pasiran, Kuala, Melayu, Tengah
Televisi		2018	2	3.213.986,00	6.427.972,00	Kel. Kuala, Kel. Tengah (Kec. Skw Barat)
Printer	Epson L360	2018	4	2.757.197,00	11.028.788,00	Kel. Pasiran, Kuala, Melayu, Tengah
AC Split	1 PK	2018	1	4.664.392,00	4.664.392,00	Perpustakaan
Meja Rapat	Uno Persegi	2018	1	2.230.000,00	2.230.000,00	Perpustakaan
Meja 1/2 Biro		2018	2	1.433.664,00	2.867.328,00	Perpustakaan
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	2	685.125,00	1.370.250,00	Perpustakaan
Filling Besi/Metal	Rione	2018	1	2.570.936,00	2.570.936,00	Perpustakaan
PC	HP All In One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	Perpustakaan
Printer	Epson L360	2018	2	2.757.197,00	5.514.394,00	Perpustakaan
AC Split	1,5 PK	2018	2	6.810.000,00	13.620.000,00	Bappeda
Printer	Epson L360	2018	2	2.757.197,00	5.514.394,00	Bappeda
Teralis		2018	1	38.915.000,00	38.915.000,00	BKPSDM
Teralis		2018	1	1.505.000,00	1.505.000,00	BKPSDM
Teralis		2018	3	1.905.000,00	5.715.000,00	BKPSDM
Teralis		2018	1	27.785.000,00	27.785.000,00	BKPSDM
Teralis		2018	3	1.905.000,00	5.715.000,00	BKPSDM
Printer	HP laserjett	2018	1	15.765.000,00	15.765.000,00	Perkimta
Kursi Tamu		2018	1	5.118.750,00	5.118.750,00	Kel. Sei Bulan
Kursi Tamu		2018	1	5.118.750,00	5.118.750,00	Kel. Semelagi Kecil
PC	HP All In One	2018	3	6.030.938,00	18.092.814,00	Kel. Sedau, Pangmilang, Kecamatan SKw Selatan
Printer	Epson L360	2018	3	2.757.197,00	8.271.591,00	Kel. Sedau, Pangmilang, Kecamatan SKw Selatan
PC	HP All In One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	BPBD
Printer	Epson L360	2018	1	2.757.197,00	2.757.197,00	BPBD
PC	HP All In One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	Kel. Kuala (Kec. Skw Barat)

Printer	Epson L360	2018	1	2.757.197,00	2.757.197,00	Kel. Kuala (Kec. Skw Barat)
PC	HP All In One	2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	TU Wawako (setda)
Printer	Epson L565	2018	1	4.784.017,00	4.784.017,00	TU Wawako (setda)
Meja Rapat	Uno Persegi	2017	1	2.550.000,00	2.550.000,00	Satpol PP
Meja Rapat	Uno Persegi	2017	1	2.550.000,00	2.550.000,00	Dinas Pertanian
Meja Rapat	Uno Persegi	2017	1	2.550.000,00	2.550.000,00	BPBD
Kursi Kerja Staf	Fantoni	2018	2	685.125,00	1.370.250,00	Satpol PP
Meja 1/2 Biro	1 PK	2018	2	1.433.664,00	2.867.328,00	Satpol PP
AC Split	1 PK	2018	2	4.664.392,00	9.328.784,00	Disperindag
AC Split	1,5 PK	2018	1	4.664.392,00	4.664.392,00	BPBD
AC Split	Epson L360	2018	1	6.810.000,00	6.810.000,00	Dinas Pertanian
Printer	HP All In One	2018	1	2.757.187,00	2.757.187,00	Perkimta
PC		2018	1	6.030.938,00	6.030.938,00	Perkimta
Meja 1/2 Biro		2018	3	1.433.664,00	4.300.992,00	Perkimta
Meja 1/2 Biro		2018	4	1.433.664,00	5.734.656,00	DLH
Meja 1 biro	Rione	2017	1	2.175.000,00	2.175.000,00	DLH
Jumlah					793.977.211,00	

Alat Studio dan Alat Komunikasi	Tahun	Jlh	Harga Satuan	Harga	Tujuan SKPD
HT YAESU	2018	5	3.120.000,00	15.600.000,00	Setda
Lain - Lain (Parabola)	2018	1	1.205.242,00	1.205.242,00	Setda
UPS	2018	3	1.045.172,00	3.135.516,00	Kesbang
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	Penanaman Modal
UPS	2018	3	1.045.172,00	3.135.516,00	Disperindag
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	Satpol PP
UPS	2018	2	1.045.172,00	2.090.344,00	Kec. Skw Tengah, Bukit Batu
Lain - Lain (Parabola)	2018	2	1.205.245,00	2.410.490,00	Setapak Kecil
Lain - Lain (Parabola)	2018	1	1.205.245,00	1.205.245,00	Setapak Kecil
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	Kel. Sanggau Kulor, Bagak Sahwa, Pajintan (Skw Timur)
Lain - Lain (Parabola)	2018	5	1.205.245,00	6.026.225,00	Kel. Sedau, Pangmilang
Lain - Lain (Parabola)	2018	2	1.205.245,00	2.410.490,00	Kel. Kuala, Kel. Tengah (Kec. Skw Barat)
Lain - Lain (Parabola)	2018	2	1.205.245,00	2.410.490,00	Perpustakaan
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	Kel. Sedau, Pangmilang, Kecamatan SKw Selatan
UPS	2018	3	1.045.172,00	3.135.516,00	BPBD
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	Kel. Kuala (Kec. Skw Barat)
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	TU Wawako (setda)
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	PERKIMTA
UPS	2018	1	1.045.172,00	1.045.172,00	Setda
Jumlah				51.126.450,00	

b. Hibah Keluar

Hibah peralatan dan mesin pada Tahun 2018 Sebesar Rp. 323.025.000,00 terdiri dari alat-alat angkutan sebesar Rp 316.000.000,00 serta alat kantor dan rumah tangga Rp. 7.025.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut:

<i>Alat-alat Angkutan</i>	<i>Harga</i>	<i>Hibah ke</i>	<i>Nomor Berita Acara Hibah</i>
<i>Sepeda Motor Yamaha Vega KB 5863 YU</i>	<i>15.950.000,00</i>	<i>UPPD Dispenda Prov Kalbar</i>	<i>028/02/BKD-ASSET.B/2018</i>
<i>Sepeda Motor Kawasaki</i>	<i>31.700.000,00</i>	<i>UPPD Dispenda Prov Kalbar</i>	<i>028/02/BKD-ASSET.B/2018</i>
<i>Sepeda Motor Kawasaki</i>	<i>34.200.000,00</i>	<i>PT PLN Rayon SKw</i>	<i>028/03/BKD-ASSET.B/2018</i>
<i>Sepeda Motor Yamaha Vega KB 5862 YU</i>	<i>15.950.000,00</i>	<i>Kantor Pertanahan Kota Singkawang</i>	
<i>Sepeda Motor Kawasaki</i>	<i>31.700.000,00</i>	<i>Kantor Pertanahan Kota Singkawang</i>	
<i>Mobil Tangki</i>	<i>186.500.000,00</i>	<i>Badan Pemadam Kebakaran Swasta Siaga Kota Skw</i>	<i>030/233/BKD.ASSET-B Tahun 2018 Tgl 17 September 2018</i>
<i>Jumlah</i>	<i>316.000.000,00</i>		

<i>Alat Rumah Tangga</i>	<i>Harga</i>	<i>Hibah ke</i>	<i>Nomor Berita Acara Hibah</i>
<i>GPS Garmin Montana 650</i>	<i>7.025.000,00</i>	<i>Kantor Pertanahan Kota Singkawang</i>	<i>028/05/BKD-ASSET.B/2018</i>
<i>Jumlah</i>	<i>7.025.000,00</i>		

c. Reklasifikasi Tahun Berjalan

Rincian aset peralatan dan mesin yang mengalami reklasifikasi sebesar Rp. 81.752.000,00 diperoleh dari kursi rapat Rp. 165.425.000,00 dikurangi meja rapat Rp. 44.310.000,00 dikurangi kapitalisasi rak kayu Rp. 3.558.000,00 dikurangi belanja modal rak kayu Rp. 35.805.000,00

1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.301.921.395,54	8.319.070.107,00
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	716.213.270,00	583.602.750,00
3. Tugu Titik Kontrol/Pasti	559.462.857,00	432.364.157,00
<i>Jumlah</i>	<i>11.577.597.522,54</i>	<i>9.335.037.014,00</i>

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 merupakan saldo per 31 Desember 2017 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/kurang karena adanya belanja modal Tahun 2018, Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, Reklasifikasi tahun berjalan, sehingga nilai saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.577.597.522,54 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Saldo Awal per 31 Desember 2018	9.335.037.014,00
2.	Penambahan:	
	- Realisasi Belanja Modal 2018	399.469.424,00
	- Mutasi Masuk	2.786.457.117,64
	- Kapitalisasi realisasi Belanja Non Modal	19.800.000,00
3.	Pengurangan:	
	- Hibah Keluar	(531.282.033,10)
	- Reklasifikasi Tahun Berjalan	(83.793.000,00)
	- Reklasifikasi Koreksi	(348.091.000,00)
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2018	11.577.597.522,54

1. Penambahan

a. *Realisasi Belanja Modal*

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 399.469.424,00 terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp. 399.469.424,00

<i>Belanja modal Bangunan Gedung</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Bangunan Gedung</i>	<i>1</i>	<i>155.829.424,00</i>	<i>155.829.424,00</i>
<i>Meja Rapat dan Meja Sudut Aula</i>	<i>14</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>44.310.000,00</i>
<i>Photo Presiden dan Wakil Presiden</i>	<i>1</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
<i>Pagar</i>	<i>1</i>	<i>115.607.700,00</i>	<i>115.607.700,00</i>
<i>Gudang</i>	<i>1</i>	<i>47.797.300,00</i>	<i>47.797.300,00</i>
<i>Rak Kayu 1</i>	<i>2</i>	<i>2.794.000,00</i>	<i>5.588.000,00</i>
<i>Rak Kayu 2</i>	<i>1</i>	<i>4.404.100,00</i>	<i>4.404.100,00</i>
<i>Rak Kayu 3</i>	<i>2</i>	<i>5.554.800,00</i>	<i>11.109.600,00</i>
<i>Rak Kayu 4</i>	<i>2</i>	<i>3.977.300,00</i>	<i>7.954.600,00</i>
<i>Rak Kayu 5</i>	<i>1</i>	<i>3.582.700,00</i>	<i>3.582.700,00</i>
<i>Rak Kayu 6</i>	<i>2</i>	<i>1.583.000,00</i>	<i>3.166.000,00</i>
<i>Jumlah</i>			<i>399.469.424,00</i>

b. Mutasi Masuk

Mutasi masuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.786.457.117,64 terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp. 2.620.097.564,54 dan bangunan monumen sebesar Rp. 166.359.553,10

<i>Bangunan Gedung</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga</i>	<i>Dari SKPD</i>
<i>Peningkatan Gedung PDAM Kota Singkawang</i>	2010	149.580.000,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung PMI</i>	2006	1.017.316.350,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Kantor KPU)</i>	2005	45.905.000,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor KPU)</i>	2006	263.869.350,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Pembuatan Pagar dan Prasarana Kantor KPU</i>	2007	99.374.000,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Perluasan Workshop</i>	2008	348.091.000,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BKD Kota Singkawang</i>	2017	198.428.864,54	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Pembangunan Asrama dan Garasi PMI Singkawang</i>	2009	497.533.000,00	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Jumlah</i>		2.620.097.564,54	

<i>Bangunan Monumen</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga</i>	<i>Dari SKPD</i>
<i>Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bea dan Cukai</i>	2017	166.359.553,10	<i>Dinas PUPR</i>
<i>Jumlah</i>		166.359.553,10	

2. Pengurangan

a. Hibah Keluar

Hibah keluar gedung dan bangunan sebesar Rp. 531.282.033,10 terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp. 364.922.480,00 dan bangunan monumen sebesar Rp. 166.359.553,10

<i>Gedung dan Bangunan</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga</i>	<i>Hibah Ke</i>	<i>Nomor Berita Acara Hibah</i>
<i>Rumah Negara Permanen Type C (Rumah Dinas Bea Cukai)</i>	1	364.922.480,00	<i>Bea dan Cukai</i>	030/175/BKB.ASSET.B TAHUN 2018
<i>Pagar Rumah Dinas Bea dan Cukai</i>	1	166.359.553,10	<i>Bea dan Cukai</i>	030/175/BKB.ASSET.B TAHUN 2018
<i>Jumlah</i>		531.282.033,10		

b. Reklasifikasi Tahun Berjalan

<i>Rincian Aset yang mengalami Reklasifikasi</i>	<i>Jlh</i>	<i>Satuan Harga</i>	<i>Jlh harga</i>	<i>Akun Belanja sesuai LRA</i>	<i>Akun Barang setelah direklasifikasi</i>
Rak Kayu 1	2	2.794.000,00	5.588.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 2	1	4.404.100,00	4.404.100,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 3	2	5.554.800,00	11.109.600,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 4	2	3.977.300,00	7.954.600,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 5	1	3.582.700,00	3.582.700,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 6	2	1.583.000,00	3.166.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 1	2	277.500,00	555.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan (Meubelair)	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 2	1	438.000,00	438.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan (Meubelair)	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 3	2	552.000,00	1.104.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan (Meubelair)	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 4	2	395.000,00	790.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan (Meubelair)	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 5	1	356.000,00	356.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan (Meubelair)	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rak Kayu 6	2	157.500,00	315.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan (Meubelair)	Alat Kantor dan Rumah Tangga
Photo Presiden dan Wakil Presiden	1	120.000,00	120.000,00	Gedung dan Bangunan (Design Interior)	Alat Kantor dan RT (Extra Countable)
Meja Rapat dan Meja Sudut Aula	14	3.165.000,00	44.310.000,00	Gedung dan Bangunan (Design Interior)	Alat Kantor dan RT (Intra Countable)
Pagar	1	115.607.700,00	115.607.700,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Monumen
Pagar	1	11.491.000,00	11.491.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan	Monumen
Jumlah			210.891.700,00		

<i>Rincian Aset yang mengalami Reklasifikasi</i>	<i>Jlh harga</i>	<i>Akun Belanja sesuai LRA</i>	<i>Akun Barang setelah direklasifikasi</i>
<i>Pagar</i>	<i>115.607.700,00</i>	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>Monumen</i>
<i>Pagar</i>	<i>11.491.000,00</i>	<i>Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan</i>	<i>Monumen</i>
<i>Jumlah</i>	<i>127.098.700,00</i>		

c. Reklasifikasi Karena Koreksi

<i>Rincian Aset yang mengalami Reklasifikasi</i>	<i>Jlh harga</i>	<i>Akun Belanja sesuai LRA</i>	<i>Akun Barang setelah direklasifikasi</i>
<i>Perluasan Workshop</i>	<i>348.091.000,00</i>	<i>Mutasi Masuk Bangunan Gedung</i>	<i>Aset Lain-lain</i>
<i>Jumlah</i>	<i>348.091.000,00</i>		

1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 749.335.605,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 749.335.605,00 yang diuraikan sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Instalasi Air Minum Bersih	4.676.000,00	4.676.000,00
2. Instalasi Pembangkit Listrik	108.112.000,00	108.112.000,00
3. Instalasi Gardu Listrik	433.737.030,00	433.737.030,00
4. Jaringan Listrik	202.810.575,00	202.810.575,00
<i>Jumlah</i>	<i>749.335.605,00</i>	<i>749.335.605,00</i>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 merupakan saldo per 31 Desember 2017 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/kurang karena adanya belanja modal Tahun 2018, mutasi masuk, mutasi keluar, sehingga nilai saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 749.335.605,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Saldo Awal per 31 Desember 2018	749.335.605,00
2.	Penambahan:	
	- Realisasi Belanja Modal 2018	147.223.610,00
3.	Pengurangan:	
	- Mutasi Keluar	(142.441.030,00)
	- Reklasifikasi	(4.782.580,00)
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2018	749.335.605,00

1. Penambahan

a. *Realisasi Belanja Modal*

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 147.223.610,00 terdiri dari belanja modal jaringan sebesar Rp. 147.223.610,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

<i>Belanja Modal Jaringan</i>	<i>Jlh</i>	<i>Satuan</i>	<i>Harga</i>
<i>Penambahan Daya Listrik BKPSDM</i>	<i>1</i>	<i>34.155.400,00</i>	<i>34.155.400,00</i>
<i>Penambahan Daya Listrik Dinas Lingkungan Hidup</i>	<i>1</i>	<i>108.285.630,00</i>	<i>108.285.630,00</i>
<i>Penyambungan Baru listrik Rumah Bea Cukai</i>	<i>1</i>	<i>4.782.580,00</i>	<i>4.782.580,00</i>
<i>Jumlah</i>			<i>147.223.610,00</i>

2. Pengurangan

a. *Mutasi Keluar*

Mutasi keluar jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 142.441.030,00 terdiri dari:

<i>Mutasi Keluar Jaringan :</i>	<i>Jlh</i>	<i>Harga</i>	<i>Tujuan Skpd</i>
<i>Penambahan Daya Listrik BKPSDM</i>	<i>1</i>	<i>34.155.400,00</i>	<i>BKPSDM</i>
<i>Penambahan Daya Listrik Dinas Lingkungan Hidup</i>	<i>1</i>	<i>108.285.630,00</i>	<i>DLH</i>
<i>Jumlah</i>		<i>142.441.030,00</i>	

b. Reklasifikasi

Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.782.580,00 terdiri dari:

<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	<i>Harga</i>	<i>Akun belanja</i>	<i>Akun setelah barang direklas</i>
<i>Penyambungan Baru listrik Rumah Bea Cukai</i>	4.782.580,00	<i>Jaringan (Intra Countable)</i>	<i>Jaringan (Extra Countable)</i>
<i>Jumlah</i>	4.782.580,00		

1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Buku/Perpustakaan	-	-
2. Barang Bercorak Seni/Kebudayaan	5.460.000,00	5.460.000,00
3. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
<i>Jumlah</i>	5.460.000,00	5.460.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan saldo per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan belanja modal aset lainnya Tahun 2018.

1.2.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan belum selesai sebesar Rp. 91.498.000,00 yang mana tidak ada perubahan pada kontruksi dalam pengerjaan Tahun 2018.

<i>Kontruksi Dalam Pengerjaan</i>	<i>Tahun</i>	<i>Harga</i>	<i>Keterangan</i>
<i>- Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Tanah (Nyarumkup)</i>	2017	46.112.000,00	<i>Reklasifikasi</i>
<i>- Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Tanah (Roban)</i>	2017	45.386.000,00	<i>Kapitalisasi</i>
<i>Jumlah</i>		91.498.000,00	

1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset pada Pemerintah Kota Singkawang merupakan akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Singkawang. Penyusutan dilakukan

dengan menggunakan metode garis lurus dari tahun perolehan. Rincian akumulasi penyusutan Tahun 2018 sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<i>1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	(8.634.682.342,41)	(7.567.810.295,50)
a. Alat Angkutan Darat Bermotor	(3.263.777.812,75)	(3.371.930.027,00)
b. Alat Ukur	(7.200.000,00)	(7.200.000,00)
c. Alat Kantor	(642.429.070,80)	(502.629.907,00)
d. Alat Rumah Tangga	(714.332.579,40)	(520.175.625,00)
e. Peralatan Komputer	(3.480.227.024,73)	(2.748.428.736,50)
f. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(113.366.175,00)	(87.914.000,00)
g. Alat Studio	(340.957.346,40)	(273.205.000,00)
h. Alat Komunikasi	(9.109.000,00)	(9.562.000,00)
i. Peralatan Pemancar	(1.362.500,00)	(1.090.000,00)
j. Unit-unit Laboratorium	(9.187.500,00)	(6.125.000,00)
k. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	(52.733.333,33)	(39.550.000,00)
<i>2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	(2.671.064.401,50)	(1.466.179.765,32)
a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	(2.463.649.247,34)	(1.418.625.632,18)
b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(187.712.360,34)	(38.906.850,00)
c. Tugu Titik Kontrol/Pasti	(19.702.793,82)	(8.647.283,14)
<i>3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	(96.130.596,05)	(77.358.239,25)
a. Instalasi Air Minum/Air Bersih	(623.466,67)	(467.600,00)
b. Instalasi Pembangkit Listrik	(13.952.050,00)	(11.249.250,00)
c. Instalasi Gardu Listrik	(70.097.335,00)	(59.253.909,25)
d. Jaringan Listrik	(11.457.744,38)	(6.387.480,00)
Jumlah	(11.401.877.339,96)	(9.111.348.300,07)

Aset Tetap merupakan permasalahan krusial yang berjumlah material yang selalu menjadi catatan di dalam LHP BPK RI selama ini, baik permasalahan yang bersifat internal pada Pemerintah Kota Singkawang maupun yang bersifat eksternal.

1. Nilai aset yang dicantumkan merupakan nilai aset gabungan yang merupakan peninggalan dari kabupaten induk yang telah ada penyerahan secara resmi. Kemudian ditambah dengan nilai aset yang diperoleh sendiri dari kapitalisasi belanja modal dan lainnya dari

- mulai awal terbentuknya Pemerintah Kota Singkawang pada Tahun 2002.
2. Kebijakan kapitalisasi masih menggunakan belanja modal sebagai acuan dasar. Pembatasan nilai aset yang dikapitalisasi yang sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 51 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi telah dilaksanakan.
 3. Mulai diterapkannya penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 41 dan 42 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang.
 4. Realisasi belanja modal yang dianggarkan di kapitalisasi ke dalam Aset Tetap/terjadinya penghapusan beberapa item aset dengan Surat Keputusan Walikota Singkawang.
 5. Terjadinya mutasi aset dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang ke SKPD lain.
 6. Dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2018 telah menggunakan Aplikasi SIPKD modul Aset di mana pencatatan akun didasarkan pada kode rekening barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

1.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan ditambah Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Aset Tidak Berwujud Lainnya	353.250.000,00	353.250.000,00
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(313.750.000,00)	(267.500.000,00)
3. Aset Lain-Lain	348.091.000,00	0,00
4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	387.591.000,00	85.750.000,00

a. Aset Tidak Berwujud

Aset tak Berwujud per 31 Desember 2018 merupakan aset tidak berwujud lainnya Tahun 2016 berupa *Software* Aplikasi Komputer senilai Rp. 353.250.000,00.

b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan amortisasi aset tak berwujud berupa aplikasi/*software* sampai dengan Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus dari tahun perolehan. Sehingga diperoleh sebesar Rp. 313.750.000,00.

c. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 merupakan hasil reklasifikasi barang karena koreksi Tahun 2018 dari Mutasi Masuk Bangunan Gedung berupa Perluasan Workshop senilai Rp. 348.091.000,00.

2. KEWAJIBAN**a. Kewajiban Jangka Pendek.**

Merupakan pendapatan diterima di muka pada objek pajak reklame sebesar Rp. 117.972.918,75 (daftar terlampir).

3. EKUITAS

Jumlah Aset sebesar Rp. 61.084.097.042,82 sedangkan pada posisi Ekuitas sebesar Rp. 60.966.124.124,07 yang terdiri dari:

1. Ekuitas Awal per 31 Desember 2018	Rp.	55.810.707.594,87
2. Surplus/Defisit – LO	Rp.	31.751.117.801,77
3. Ekuitas untuk di Konsolidasikan – RK PPKD	Rp.	(30.628.514.560,57)
4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:		
- Selisih Reevaluasi Aset Tetap	Rp.	359.410.654,85
- Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	Rp.	1.910.968.748,23
- Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	Rp.	(3.779.056.691,00)
- Penghapusan	Rp.	(1.135.626.031,00)
- Lain-lain	Rp.	6.677.116.606,92
5. Saldo per 31 Desember 2018	Rp.	60.966.124.124,07

II. Penjelasan LRA

Jumlah Pendapatan dalam Tahun 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 43.670.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.233.640.629,57 atau 110,45 persen. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Pajak Daerah

Target anggaran setelah perubahan untuk pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp. 43.570.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.215.803.129,57 atau 110,66 persen. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Badan Keuangan Daerah yang dipungut sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1. Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.174.104.554,00	105,80
2. Pajak Restoran	5.300.000.000,00	6.235.094.993,00	117,64
3. Pajak Hiburan	2.800.000.000,00	3.044.422.573,00	108,73
4. Pajak Reklame	750.000.000,00	677.700.566,00	90,36
5. Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000,00	14.092.395.500,00	104,39
6. Pajak Parkir	350.000.000,00	404.357.706,00	115,53
7. Pajak Air Tanah	20.000.000,00	23.103.000,00	115,52
8. Pajak Sarang burung Walet	50.000.000,00	5.261.000,00	10,52
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	230.609.858,00	76,87
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	6.874.602.651,00	105,76
11. Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.000.000.000,00	13.454.150.728,57	122,31
Jumlah	43.570.000.000,00	48.215.803.129,57	110,45

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggunaan Fasilitas Aset Daerah. Target sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.837.500,00 atau 17,84 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1. Sewa Gedung Pusat Informasi Pariwisata		2.500.000,00	
2. Sewa Halaman Parkir Kridasana		15.337.500,00	
Jumlah	100.000.000,00	17.837.500,00	17,84%

b. Belanja

Belanja Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dikelompokkan menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 21.986.838.622,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.605.126.069,00 atau 80,07 persen.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

1.1 Belanja Pegawai

Merupakan rekapitulasi keseluruhan Belanja Pegawai di Badan Keuangan Daerah berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang disampaikan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan setiap bulannya, jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.704.968.460,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.722.021.077,00 atau sebesar 88,71 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	3.881.328.093,00	3.523.161.598,00	90,77
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.690.854.000,00	1.597.517.479,00	94,48
3. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	275.000.000,00	233.534.000,00	84,92
4. Insetif Pemungutan Pajak Daerah	2.153.500.000,00	1.960.825.000,00	91,05
5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	365.000.000,00	125.575.000,00	34,40
6. Uang Lembur	-	-	-
7. Tambahan Penghasilan PNS	339.286.367,00	281.408.000,00	82,94
Jumlah	8.704.968.460,00	7.722.021.077,00	88,71

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Merupakan rekapitulasi keseluruhan Belanja Barang Jasa di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang di sampaikan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.648.483.162,00 dan terealisasi Rp. 6.322.869.884,00 atau sebesar 73,11 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1. Belanja Bahan Habis Pakai	717.910.850,00	615.133.075,00	85,68
2. Belanja Bahan Material	15.650.000,00	10.280.000,00	65,69
3. Belanja Jasa Kantor	3.294.059.301,00	2.162.028.374,00	65,63
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	533.800.000,00	344.980.516,00	64,63
5. Belanja Cetak dan Penggandaan	761.832.425,00	625.990.800,00	82,17
6. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	9.000.000,00	60,00
7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	-
8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.000.000,00	19.400.000,00	74,62
9. Belanja Makanan dan Minuman	540.217.400,00	405.898.786,00	75,14
10. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	55.000.000,00	36.650.000,00	66,64
11. Belanja Pakaian Kerja	52.500.000,00	48.975.000,00	93,29
12. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Pakaian	110.250.000,00	73.015.000,00	66,23
13. Belanja Perjalanan Dinas	1.221.153.116,00	981.267.569,00	80,36
14. Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	79.923.500,00	76,12
15. Belanja Jasa Konsultasi	70.000.000,00	19.800.000,00	28,29
16. Biaya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	180.000.000,00	53.992.824,00	30,00
17. Belanja Barang diserahkan kepada Masyarakat/pihak Ketiga	0,00	0,00	-
18. Honorium PNS	565.400.000,00	489.775.000,00	86,62
19. Honorium Non PNS	380.710.070,00	346.759.440,00	91,08
Jumlah	8.648.483.162,00	6.322.869.884,00	73,11

1.3 Belanja Hibah

Merupakan belanja hibah yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 82.500.000,00 dan terealisasi Rp. 69.054.000,00 atau sebesar 83,70 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1. Belanja Hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	82.500.000,00	69.054.000,00	83,70
Jumlah	82.500.000,00	69.054.000,00	83,70

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.550.887.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.491.181.108,00 atau 76,71 persen.

Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1. Belanja Modal Tanah	557.627.000,00	0,00	-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.322.310.000,00	2.944.488.074,00	88,63
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.700.000,00	399.469.424,00	99,69
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	270.250.000,00	147.223.610,00	54,48
Jumlah	4.550.887.000,00	3.491.181.108,00	76,71

III. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah tersebut terdiri atas 11 jenis Pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang hanya dari Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah. PAD-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2018, sehingga nilai PAD-LO sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2018 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya, dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2018, adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LO
1	Pajak Hotel	2.911.885.297,00
2	Pajak Restoran	6.241.938.696,00
3	Pajak Hiburan	2.736.133.144,00
4	Pajak Reklame	784.601.137,92
5	Pajak Penerangan Jalan	14.092.395.500,00
6	Pajak Parkir	438.164.906,00
7	Pajak Air Tanah	25.213.200,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.261.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	230.974.822,00
10	PBB P2	9.534.404.214,00
11	BPHTB	13.454.150.728,57
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.837.500,00
Jumlah		50.472.960.145,49

2. Beban

Beban-LO merupakan Beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2018. Beban-LO terdiri dari Beban Operasi dan Defisit Non Operasional dengan realisasi pada Tahun 2018 Sebagai berikut:

a. Beban Operasi

Beban Operasional/Operasi-LO terdiri atas:

1) *Beban Pegawai*

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 7.722.021.077,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	Per 31 Desember 2018
1. Beban Gaji dan tunjangan	3.523.161.598,00
2. Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.597.517.479,00
3. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	233.534.000,00
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.960.825.000,00
5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.575.000,00
6. Uang Lembur	0,00
7. Beban Tambahan Penghasilan Lainnya	281.408.000,00
Jumlah	7.722.021.077,00

2) *Beban Barang dan Jasa*

Saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 6.307.997.959,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2018
1. Beban Bahan Pakai Habis	615.709.600,00
2. Beban Persediaan Bahan/ Material	10.280.000,00
3. Beban Jasa Kantor	2.162.028.374,00
4. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	344.980.516,00
5. Beban Cetak dan Penggandaan	610.542.350,00
6. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00
7. Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00
8. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.400.000,00
9. Beban Makanan dan Minuman	405.898.786,00
10. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	36.650.000,00
11. Beban Pakaian Kerja	48.975.000,00
12. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	73.015.000,00
13. Beban Perjalanan Dinas	981.267.569,00
14. Beban Pemeliharaan	79.923.500,00
15. Beban Jasa Konsultasi	19.800.000,00
16. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	53.992.824,00
17. Beban Honorarium PNS	489.775.000,00
18. Beban Honorarium Non PNS	346.759.440,00
Jumlah	6.307.997.959,00

3) *Beban Hibah*

Beban Hibah merupakan nilai hibah yang diserahkan kepada kelompok masyarakat pada Tahun 2018 sebesar Rp. 69.054.000,00.

4) *Beban Penyusutan dan Amortisasi*

Beban Penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp. 2.057.223.769,41 dikarenakan adanya penambahan aset dan lain-lain. Rincian perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Per 31 Desember 2018
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.657.292.549,93
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	338.244.083,93
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.772.356,80
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	46.250.000,00
Jumlah	2.060.558.990,66

5) *Beban Penyisihan Piutang*

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan Piutang 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.325.554.660,37.

6) *Beban Lain-lain*

Beban Lain-lain merupakan aset *ekstra comptable* yang di mutasi keluar sebesar Rp. 165.545.000,00.

b. Defisit Non Operasional

Penghapusan aset tetap yang menambah beban non operasioanal di LO merupakan defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp. 978.759.947,77.

IV. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Saldo awal Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp. 55.810.707.594,87 merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2017.

b. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO Rp. 31.843.468.510,69 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.

c. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp. 60.966.124.124,07 apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas Tahun 2017 sebesar Rp. 55.810.707.594,87 ada kenaikan sebesar Rp. 5.155.416.529,20.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

1) Selisih Reevaluasi/ Koreksi/Kapitalisasi Aset Tetap

Merupakan kapitalisasi aset tetap dan adanya koreksi akumulasi aset tetap karena adanya kesalahan pencatatan atas aset tetap, sehingga disesuaikan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 323.468.654,85.

2) Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap

Ekuitas mutasi masuk aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.910.968.748,23 merupakan selisih dari Ekuitas Mutasi Masuk Aset tetap sebesar Rp. 2.786.457.117,64 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 875.488.369,41.

3) Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap

Ekuitas mutasi keluar aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.779.056.691,00 merupakan selisih Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap sebesar Rp. 4.319.160.071,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 540.103.380,00.

4) Penghapusan.

Merupakan penyesuaian pendapatan yang tidak diakui saldo piutang tahun lalu sebesar Rp. 1.135.186.911,00 dan penyesuaian atas pendapatan BPHTB pembayaran telah dilakukan tahun lalu dengan bukti lunas sebesar Rp. 439.120,00.

5) Lain-Lain

Saldo lain-lain merupakan denda piutang PBB sebesar Rp. 6.620.707.898,00.

e. Jumlah Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 sebesar Rp. 60.966.124.124,07.

B. Laporan Keuangan Pengeluaran PPKD**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2018 setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 26.903.596.843,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.028.198.454,00 atau 93,03 persen dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Hibah	19.013.500.000,00	18.099.240.800,00	95,19
2.	Belanja Bantuan Sosial	6.129.756.000,00	5.981.594.600,00	97,58
3.	Belanja Bantuan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	860.340.843,00	820.509.999,00	95,37
4.	Belanja Tidak Terduga	900.000.000,00	126.853.055,00	14,09
	Jumlah	26.903.596.843,00	25.028.198.454,00	93,03

a. Belanja Hibah

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 400/274/KESRA Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 400/61/KESRA-C Tahun 2018 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19.013.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.099.240.800,00 atau 95,19 persen, di mana terdapat pengembalian ke rekening Kas Daerah dari belanja hibah organisasi kepemudaan pada belanja Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Singkawang sebesar Rp. 49.835.500,00. Dengan rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Perubahan	Realisasi 2018
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	90.000.000,00	-
1.1	Pemerintah Pusat	90.000.000,00	-
2.	Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga / Org. Kemasyarakatan	2.280.000.000,00	2.145.874.500,00
2.1	Belanja Hibah Organisasi Wanita	525.000.000,00	524.500.000,00
2.2	Belanja Hibah Generasi Muda/ Organisasi Kepemudaan	930.000.000,00	851.874.500,00
2.3	Belanja Hibah Organisasi Keagamaan	750.000.000,00	695.000.000,00
2.4	Belanja Lembaga Non Pemerintah	75.000.000,00	74.500.000,00
3	Belanja Hibah Kepada Kelompok /Anggota Masyarakat	16.643.500.000,00	15.953.366.300,00
3.1	Belanja Hibah Keolahragaan	1.265.000.000,00	1.151.500.000,00
3.2	Belanja Hibah Kesenian/Kebudayaan	1.135.000.000,00	1.132.495.000,00
3.3	Belanja Hibah Keagamaan	1.690.000.000,00	1.670.000.000,00
4	Belanja Hibah Kegiatan Sosial	2.356.000.000,00	2.241.871.300,00
5	Belanja Hibah pemadam Kebakaran Swasta	850.000.000,00	850.000.000,00
6	Belanja Hibah Pembangunan Rumah Ibadah dan Sarana Ibadah	7.562.500.000,00	7.282.500.000,00
7	Belanja Hibah Kegiatan Pendidikan	1.750.000.000,00	1.590.000.000,00
7.1	Belanja Hibah kepada panitia Perayaan Hari-hari Besar	35.000.000,00	35.000.000,00
Jumlah		19.013.500.000,00	18.099.240.800,00
Pengembalian ke kas Daerah			49.835.500,00
Realisasi Anggaran			18.149.076.300,00

Rincian belanja hibah terlampir

b. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 400/274/KESRA TAHUN 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 400/61/KESRA-C Tahun 2018 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Belanja Bantuan Sosial dengan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.129.756.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.981.594.600,00 atau 97,58 persen.

Dan Belanja Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni dan Belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.212.357.000,00 sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 653/179/Perkimta.Perum-A/Tahun 2018 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2018. Dengan rincian Belanja Bantuan Sosial seperti di bawah ini :

No	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	Pagu Perubahan	Realisasi
1	Belanja Bansos Panti Sosial Kepada Masyarakat / kelompok Masyarakat	6.114.756.000,00	5.969.080.600,00
1.1	Belanja Bantuan Sosial Panti Sosial	594.200.000,00	507.200.000,00
1.2	Belanja Bantuan Sosial untuk Pelayanan kesehatan	10.800.000,00	10.800.000,00
1.3	Belanja Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni	5.259.756.000,00	5.212.357.000,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial untuk Pendidikan	250.000.000,00	238.723.600,00
2	Belanja Bantuan Sosial Untuk Kepada Lembaga Non Pemerintah	15.000.000,00	12.514.000,00
2.1	Belanja Bantuan Sosial Untuk Biaya Hidup	15.000.000,00	12.514.000,00
Jumlah		6.129.756.000,00	5.981.594.600,00

c. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Jumlah Bantuan Keuangan Yang Diberikan Kepada Partai Politik Yang

Terwakili Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2014-2019.

Belanja Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 860.340.843,00 dengan realisasi sebesar Rp. 820.509.999,00 atau 95,37 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Bantuan Keuangan Partai Politik	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	NASDEM	69.775.809	69.775.809	100
2.	PKB	101.776.965	101.776.965	100
3.	PKS	56.944.818	56.944.818	100
	PKS 2017 (setelah perubahan)	56.944.818	56.944.818	100
4.	PDI PERJUANGAN	159.853.137	159.853.137	100
5.	GOLKAR	77.758.140	77.758.140	100
6.	GERINDRA	64.720.632	64.720.632	100
7.	DEMOKRAT	69.686.019	69.686.019	100
8.	PAN	54.646.194	54.646.194	100
9.	PPP	54.951.480	54.951.480	100
10.	HANURA	53.451.987	53.451.987	100
11.	PKPI	39.830.844	-	0
	Jumlah	860.340.843	820.509.999	95,37

Partai Politik yang tidak menyampaikan usulan realisasi pencairan bantuan keuangan parpol Tahun 2018 kepada Badan Keuangan Daerah, yaitu: PKPI sebesar Rp. 39.830.844,00.

d. Belanja Tidak Terduga

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- Keputusan Walikota Singkawang Nomor 900/210/BKD-Perbend Tahun 2018 tentang Pembebanan Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018. Pembebanan ini untuk jenis pengeluaran yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Pajak Kendaraan di atas Air (PKA) Tahun 2017 sebesar Rp. 286.855,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KA) Tahun 2017 sebesar Rp. 34.500,00.

2. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 900/273/BKD-Perbend Tahun 2018 tentang Pembebanan Anggaran Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018.

Pembebanan ini untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana sebesar Rp. 100.000.000,00.

3. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 900/309/BKD-Perbend Tahun 2018 tentang Pembebanan Anggaran Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018.

Pembebanan ini untuk Bantuan Keuangan penjemputan Almarhumah Nurmala korban bencana tsunami di Pantai Carita Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 28.400.000,00.

Belanja Tidak Terduga dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 126.853.055,00 atau 14,09 persen. Dan pengembalian ke Kas Daerah atas penjemputan jenazah Almarhumah Nurmala korban tsunami di Pantai Carita Pandeglang sebesar Rp. 1.868.300,00.

No	Belanja Bantuan Tak Terduga	Pagu	Realisasi
1	Bantuan Tidak Terduga	900.000.000,00	
1.1	Bantuan Tidak Terduga Ke Kas Daerah Propinsi Kalbar		321.355,00
1.2	Bantuan Tidak terduga pada Pemkot Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penanggulangan masyarakat terdampak bencana alam		100.000.000,00
1.3	Bantuan Tidak Terduga untuk Penjemputan Jenazah Almarhumah Nurmala Korban Tsunami di Pantai carita Pandeglang		28.400.000,00
Jumlah		900.000.000,00	128.721.355,00
Pengembalian ke kas Daerah			(1.868.300,00)
Realisasi Anggaran			126.853.055,00

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Anggaran dan realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- Keputusan Walikota Singkawang Nomor 500/71/Ekon-A Tahun 2018 tentang Besaran penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 2018.

Besaran penyertaan modal dimaksud sebesar Rp. 8.000.000.000,00.

- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 dan Keputusan Walikota Nomor 500/72/Ekon-A Tahun 2018 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018.

Besaran tambahan setoran Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 8.000.000.000,00.

3. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.000.000.000,00 atau dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Singkawang	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100
	- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100
	Jumlah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program serta pengelolaan keuangan badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pajak dan Retribusi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan; dan
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pendapatan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pajak, dan Retribusi;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan penetapan dan penagihan pajak daerah;
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pajak, dan Retribusi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan; dan
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pendapatan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran PBB dan BPHTB;
 3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB;
 5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang PBB dan BPHTB; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Rencana Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran, meliputi rencana anggaran, analisa dan pengendalian anggaran, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis rencana anggaran;
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis analisa dan pengendalian anggaran;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang pada Bidang Anggaran; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang perbendaharaan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Pengendalian dan Pencairan Dana; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Penggajian.
- Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan, meliputi pengendalian dan pencairan dana, serta pengelolaan penggajian, dengan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perbendaharaan;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan pencairan dana;
 3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan penggajian;
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang pada Bidang Perbendaharaan; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pengendalian.
- Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban, pelaporan dan pengendalian, dengan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban;
 3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaporan dan pengendalian;
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Aset;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Aset; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan Aset.

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah, meliputi perencanaan pengadaan dan penggunaan, pendayagunaan aset, dan penatausahaan aset dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pengadaan dan penggunaan;
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendayagunaan aset;
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penatausahaan aset;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas dimaksud, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Keuangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Keuangan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Personil / Pejabat yang mengisi Stuktur Organisasi tersebut adalah:

1. Kepala Dinas: **Drs. H. Muslimin, M. Si.**
2. Sekretaris: **Misran, S.IP.**
 - 2.1. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian: **Nurita.**
 - 2.2. Kepala Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan: **Dadang Jumirianto, S.Pd.**
 - 2.3. Kepala Subbag Keuangan: **Titi Murwani, SE.**
3. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi: **Bur'ie, SH, MM.**
 - 3.1. Kepala Subbid Pendataan dan Pendaftaran: **Fredrik M.S, S.Kom.**
 - 3.2. Kepala Subbid Penetapan dan Penagihan: **Parlinggoman, S.IP, MM.**
 - 3.3. Plt. Kepala Subbid Pembukuan dan Pengendalian: **Eny Pratiwi, ST, MM.**
4. Kepala Bidang PBB dan BPHTB: **Awang Herman, SE, M.Si**
 - 4.1. Kepala Subbid Pendataan dan Pendaftaran: **Abu Kirin**
 - 4.2. Kepala Subbid Penetapan dan Penagihan: **Sambyo, B.Sc.**
 - 4.3. Kepala Subbid Pembukuan dan Pengendalian: **Yulia Kurniasari, S.I.A.**
5. Plt. Kepala Bidang Anggaran: **Dede Sudrajat, SE, MM.**
 - 5.1. Plt. Kepala Subbid Rencana Anggaran: **Heri Sutami, SE.**

- 5.2. Kepala Subbid Analisa dan Pengendalian Anggaran: **Alhatip, SE.**
6. Kepala Bidang Perbendaharaan: **Idriani Astuti, S.HI.**
 - 6.1. Kepala Subbid Pengendalian Pencairan Dana: **Jatmiko, SE.**
 - 6.2. Kepala Subbid Pengelolaan Penggajian: **Hardiansyah.**
7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan: **Yulaikhah Triwahyuni, SH.**
 - 7.1. Kepala Subbid Akuntansi dan Verifikasi Pertanggung Jawaban: **Bahtiar, SE.**
 - 7.2. Kepala Subbid Pelaporan dan Pengendalian: **Linda Sukreini.**
8. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah: **Sigit Bintoro, SE.**
 - 8.1. Kepala Subbid Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan: **Dede Sudrajat, SE, MM.**
 - 8.2. Kepala Subbid Penatausahaan Aset: **U. Eddy Indrawan, Sm.Hk.**
 - 8.3. Kepala Subbid Pendayagunaan Aset: **Rady Parwinto, SH.**

2. Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Dalam Rangka Menunjang kelancaran tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri dari:

A. Pangkat/Golongan:

1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	Orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	:	1	Orang
3.	Pembina (IV/a)	:	5	Orang
4.	Penata Tk. I (III/d)	:	12	Orang
5.	Penata (III/c)	:	8	Orang
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	:	5	Orang
7.	Penata Muda (III/a)	:	14	Orang
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	:	9	Orang
9.	Pengatur (II/c)	:	4	Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	1	Orang
	Jumlah	:	60	Orang

B. Kualifikasi Pendidikan:

1.	S2	:	8	Orang
2.	S1	:	24	Orang
3.	D3	:	13	Orang
4.	D1	:	2	Orang
5.	SLTA	:	12	Orang
6.	SLTP	:	1	Orang
	Jumlah	:	60	Orang

Sedangkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat penjenjangan Karir sebanyak 13 orang terdiri dari:

1.	Diklat Pim Tk. II	:	1	Orang
2.	Diklat Pim Tk. III	:	1	Orang
3.	Diklat Spama	:	1	Orang
4.	Diklat Pim Tk. IV	:	3	Orang
5.	Diklat Adum	:	5	Orang
	Jumlah	:	11	Orang

B. Visi dan Misi**1. Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan masa akan datang mengenai apa yang diinginkan diwujudkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Visi juga merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan bagaimana organisasi/SKPD harus dibawa dan bekerja agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah “Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Optimal dan Akuntabel demi Terciptanya Kredibilitas, Keterbukaan dan Kehandalan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Menuju Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro Industri”, merupakan dasar pergerakan arah Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang ingin dicapai dan dalam waktu yang telah dilaksanakan dapat dikatakan Visi Badan

Keuangan Daerah Kota Singkawang secara bertahap mampu dilaksanakan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Semakin Membaiknya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian suatu visi. Jadi misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah:

1. Mewujudkan peningkatan capaian penerimaan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak;
3. Meningkatkan kelancaran sistem dan mekanisme kerja dalam pemungutan pendapatan daerah;
4. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, berkelanjutan, transparan dan bertanggung jawab;
5. Mewujudkan profesionalisme aparatur sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas; dan
6. Mengembangkan sistem manajemen keuangan dan aset daerah yang berbasis IT.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, sehingga dalam penyajian laporan keuangan nantinya akan lebih sempurna.

Walau demikian, untuk ke depannya kami akan berupaya semaksimal mungkin dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan secara utuh.

Singkawang, Maret 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002